

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Jakarta, 30 Nopember 2017

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUDI SANTOSA, S.H.
2. Jabatan : KEPALA DINAS - PARAWISATA
3. NHK : 212341
4. Tanggal Pelaporan : 11 Desember 2014, 13 Maret 2017

Status Laporan**II. DATA HARTA****A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

	11 Desember 2014	13 Maret 2017
	Rp. 209.726.000	Rp. 257.321.000
1. Tanah & Bangunan seluas 172 m2 & 115 m2, di Kabupaten DEMAK, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2008 sampai dengan 2014	Rp. 153.116.000	Rp. 153.116.000
2. Tanah & Bangunan seluas 66 m2 & 54 m2, di Kabupaten DEMAK, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1986 sampai dengan 2014 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 56.610.000	Rp. 64.110.000
3. Tanah seluas 164 m2, di Kabupaten DEMAK, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 (Penambahan Data Baru)	----	Rp. 40.095.000

B. HARTA BERGERAK

	11 Desember 2014	13 Maret 2017
a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	Rp. 55.000.000	Rp. 44.000.000
1. Alat Transportasi Lain, merk YAMAHA MIO, tahun pembuatan 2006, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2006 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 5.000.000	Rp. 4.000.000
2. Mobil, merk TOYOTA STARLET, tahun pembuatan 1993, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2004 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 50.000.000	Rp. 40.000.000
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA	----	----
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	----	----
C. SURAT BERTAHAGA	Rp. 0	Rp. 0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 4.431.760	Rp. 4.431.760
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI	Rp. 4.431.760	Rp. 4.431.760
E. PIUTANG	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL HARTA (II)	Rp. 269.157.760	Rp. 305.752.760
III. HUTANG	----	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 269.157.760	Rp. 305.752.760

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

